

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Klaten

Gambaran umum ini merupakan penjabaran dari kondisi wilayah Kabupaten Klaten. Kondisi umum dapat dilihat dari profil geografi, demografi, profil sosial hingga budaya. Kabupaten Klaten berada di Provinsi Jawa Tengah. Dasar terbentuknya Pemerintah Daerah Klaten ada pada UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 mengenai penetapan dan mulai berlakunya UU Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang adanya Pembentukan Daerah Kabupaten Klaten di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Klaten terdiri dari tiga kota kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah dan Klaten Selatan. Kota Klaten dulunya merupakan kota administratif, namun semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal lagi adanya istilah kota administratif dan kota Klaten kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Klaten.

Gambar 2.1.

Peta Kabupaten Klaten



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2020

Pusat Pemerintahan Kabupaten Klaten berada di Kota Klaten. Luas dari wilayah Kabupaten Klaten mencapai 655,56 km². Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan yang, terbagi atas 391 desa dan 10 kelurahan seperti gambar peta diatas.

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Klaten terbentang pada 110°26'14'' – 110°47'51'' Bujur Timur dan 7°32'19'' – 7°48'33'' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah yang ada sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

- c. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta)
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Jika dilihat berdasar pada ketinggian dari air laut, 3,72% terletak diantara ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan air laut, 12,76% terletak diantara ketinggian 500 – 2500 meter diatas permukaan air laut, dan 85,52% terletak diantara ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan air laut. Kabupaten Klaten tepat berada di antara 3 kota besar, yaitu Kota Surakarta (36 km), Kota Yogyakarta (30 km), dan Kota Semarang (100 km), dan saling terhubung dengan jalur transportasi yang sudah cukup memadai. Karena ketiga kota tersebut memiliki berbagai fasilitas yang memadai seperti Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Adi Sutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, dan juga Pelabuhan Laut Tanjung Emas, tentu saja memberikan dampak terhadap pertumbuhan Kabupaten Klaten kearah yang baik dari sisi budaya, pendidikan, ekonomi, sosial, kependudukan, maupun aspek lainnya.

2.1.2. Kondisi Demografis

Data jumlah penduduk atau calon pemilih di Kabupaten Klaten tersebar pada 26 wilayah kecamatan dimana 26 wilayah kecamatan ini kemudian diklasifikasikan menjadi 5 (lima) dapil, diantaranya terdapat KLATEN 1, KLATEN 2, KLATEN 3, KLATEN 4, KLATEN 5. Berikut tabel persebaran dapil, data pemilih Kabupaten Klaten pada tahun 2020.

Tabel 2.1.

Persebaran Daerah Pemilihan, Data Pemilih Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	DAPIL		PAC	Jumlah Ranting	Data Pemilih		Jumlah
					Laki-laki	Perempuan	
1	KLATEN 1						
		1	Kalikotes	7	13.700	14.047	27.747
		2	Kebonarum	7	7.332	7.802	15.134
		3	Klaten Selatan	12	15.791	16.687	32.478
		4	Klaten Tengah	9	15.152	16.068	31.220
		5	Klaten Utara	8	17.269	18.213	35.482
		6	Ngawen	13	16.917	17.181	34.098
		7	Wedi	19	19.543	20.182	39.725
2	KLATEN 2						
		1	Gantiwarno	16	14.635	14.938	29.573
		2	Jogonalan	18	22.025	22.463	44.488
		3	Karangnongko	14	13.687	14.334	28.021
		4	Kemalang	13	14.423	14.648	29.071
		5	Manisrenggo	16	15.785	16.423	32.208
		6	Prambanan	16	18.840	19.675	38.515
3	KLATEN 3						
		1	Jatinom	18	22.120	22.441	44.561
		2	Karanganom	19	16.968	17.520	34.488
		3	Polanharjo	18	15.139	15.853	30.992
		4	Tulung	18	19.606	20.132	39.738
4	KLATEN 4						

		1	Ceper	18	24.305	24.779	49.084
		2	Delanggu	16	15.631	16.350	31.981
		3	Juwiring	19	21.742	22.358	44.100
		4	Wonosari	18	23.065	23.674	46.739
5	KLATEN 5						
		1	Bayat	18	23.740	23.871	47.611
		2	Cawas	20	21.982	22.895	44.877
		3	Karangdowo	19	16.782	17.283	34.065
		4	Pedan	14	17.379	17.759	35.138
		5	Trucuk	18	29.826	30.110	59.936
Jumlah				401	473.384	487.686	961.070

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, diolah

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Klaten

Kebudayaan merupakan sebuah fenomena universal sebagai upaya dari tindakan manusia agar dapat meningkatkan jati diri dalam sebuah kehidupan melalui perwujudan cipta, karsa, dan juga karya. Dalam sebuah kehidupan sosial, budaya menjadi salah satu aspek penting, dikarenakan menjadi pedoman dalam bertindak, berbuat serta menentukan sikap. Indonesia, dengan keberadaan bentuk dan coraknya yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya menjadikannya sebagai negara multikultural. Kebudayaan dapat ditunjukkan oleh kesamaan kodrat manusia dari berbagai macam etnis, suku bangsa dan ras. Setiap kebudayaan tersebut, sehingga antara kebudayaan dan juga masyarakat keduanya saling berhubungan.

Kabupaten Klaten merupakan sebuah kota yang berada diantara dua kota besar yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dengan lokasi yang terletak di antara 2 (dua) kota besar tersebut, maka Kabupaten Klaten juga dikelilingi oleh beberapa keraton yaitu Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran dan Pakualaman. Hal inilah yang kemudian menjadikan Kabupaten Klaten mempunyai kaitan yang erat dengan kebudayaan Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat bahasa Jawa menjadikan bahasa krama untuk berkomunikasi. Jika ditelisik dari sejarah dan juga latar belakang cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, maka nilai-nilai luhur yang telah menjadi corak dari budaya masyarakat Klaten adalah religius spiritualis dan nasionalisme. Corak kebudayaan ini dapat dilihat dari tradisi, adat istiadat, dan wisata rohani yang ada di Kabupaten Klaten.

Sistem adat istiadat di Kabupaten Klaten merupakan akibat dari percampuran antara Jogja dan Solo membuat Kabupaten Klaten memiliki sejumlah kebudayaan adat berupa tradisi kegiatan maupun peninggalan dalam bentuk budaya rohani religius seperti kegiatan budaya yang hanya diselenggarakan setahun sekali di Kabupaten Klaten yaitu Gebyar Syawalan. Gebyar Syawalan merupakan tradisi menyebar ketupat di saat lebaran oleh para tokoh atau orang yang berwenang dengan tujuan agar ketupan yang disebar membawa berkah, syawalan ini juga selalu diikuti dengan adanya pasar kaget. Adapula upacara adat istiadat yang lainnya seperti upacara adat pada setiap bulan Jawa pada saat Safar, masyarakat Klaten sering menyebutkan dengan Saparan.

Dan salah satu tradisi kebudayaan yang menjadi simbol kegiatan adat religius di Kabupaten Klaten yaitu Yaqowiyu yang merupakan peringatan penyebaran agama islam oleh Ki Ageng Gribig dimana di dalamnya memiliki kegiatan adat dengan ditandai kegiatan penyebaran kue apem, kue ini disebar dari atas menara Masjid Gedhe Jatinom kepada masyarakat yang berkumpul. Barangsiapa yang mendapatkan apem ini akan memperoleh kesejahteraan, begitu menurut kepercayaan masyarakat sekitar,

Dengan melihat tradisi kebudayaan tersebut, dapat digambarkan bagaimana agama memberikan pengaruh yang cukup besar pada kebudayaan tradisi di lingkungan masyarakat di Kabupaten Klaten. Ajaran agama seperti Islam misalnya, yang mengandung simbol sistem sosio-kultural yang memberikan gambaran tentang realitas ditambah dengan cara untuk mewujudkannya. Namun, simbol realitas tersebut tidak selalu sama dengan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut pengertian ini, agama dipahami sebagai suatu sistem budaya (*cultural system*) (Azra, 1999: 11). Alhasil fenomena ini mulai menonjol dalam kebudayaan masyarakat. Sehingga, hal yang berkaitan tentang kemajemukan budaya lokal dan dialektika agama perlu diperhatikan implikasinya terhadap budaya masyarakat.

Kabupaten Klaten mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dengan kondisi multikultural, di dalam kehidupan masyarakat tidak pernah terjadi sebuah konflik. Agar tidak terjadi konflik antar etnis maupun antar kepercayaan

dibentuklah forum yang saling menghargai sesama agama, forum tersebut bertujuan sebagai pengikat agar dapat mewujudkan kehidupan yang damai di dalam masyarakat. Jika ada acara di Masjid, masyarakat non muslim pun ikut di undang sebagai perwakilan, dan begitu juga sebaliknya, jika ada acara di Gereja masyarakat muslim akan diundang. Penduduk asli Kabupaten Klaten merupakan masyarakat pribumi (Jawa), sementara masyarakat etnis yang lain merupakan pendatang.

Sehingga agama dan budaya lokal di Kabupaten Klaten dipandang sebagai dua buah kekuatan yang menyatu dalam realitas sosial dan pada penerapannya, masyarakat Kabupaten Klaten memiliki kecenderungan pada perilakunya dalam mengutamakan sisi agama dalam kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi dan bermusyawarah. Keadaan di masyarakat yang padat penduduk sekalipun hubungan antar warga dalam kehidupan sosial sangat erat. Kekeluargaan masih sangat tampak dari kehidupan sehari-hari masyarakat melalui kegiatan gotong royong antar warga. Ketika salah satu warga mempunyai pekerjaan atau sedang tertimpa musibah warga saling guyub rukun tolong-menolong. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana agama mempengaruhi gaya hidup dari pola perilaku di lingkungan masyarakat itu sendiri.

2.2. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

2.2.1. Sejarah Singkat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

PDI Perjuangan lahir pada 1 Februari 1999 yang merupakan hasil kongres yang diadakan di Bali pada bulan Oktober 1998. Lahirnya PDI Perjuangan tidak terlepas dari dinamika politik rezim Orde Baru, dimana pemerintah saat itu sangat membatasi gerak partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI Perjuangan pun tidak terlepas dari embrio Partai Nasional Indonesia (PNI) buatan Ir. Soekarno yang pada saat itu meleburkan partai-partai berhaluan nasionalis – sosialis pasca pemilu 1971 oleh pemerintah Orde Baru, guna memperkecil jumlah partai politik dan dengan rasionalisasi agar dapat lebih mudah mengendalikan stabilitas negara.

Pasca Pemilu 1971, terdapat 5 partai politik yang dileburkan menjadi satu, yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dan Partai Katolik. Kelima partai tersebut melebur menjadi satu wadah baru bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang secara resmi berdiri pada 10 Januari 1973. Berdirinya PDI justru menimbulkan konflik internal partai dikarenakan perbedaan latar belakang partai yang di fusi kan sehingga tidak mudah bagi PDI untuk mengakomodasi seluruh perbedaan yang ada dari kelima partai tersebut. Konflik ini mulai terjadi ketika Kongres ke IV PDI di Medan pada 21 – 25 Juli 1993, dimana segala keputusan dalam kongres tidak diakui, termasuk terpilihnya Soerjadi sebagai pimpinan DPP PDI sehingga terjadi keributan dalam partai. Kemudian

pemerintah mengambil kebijakan menunjuk Latief Pudjosakti sebagai pimpinan sementara PDI, guna melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.

Hasil dari Kongres Luar Biasa tersebut memutuskan untuk menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI. Hal ini membuat pemerintah Orde Baru panik karena dinilai dapat membuat dukungan masyarakat kepada pemerintah Orde Baru turun akibat dari kuatnya ketokohan Megawati yang merupakan putri dari Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu, stabilitas negara pada saat itu mulai goyang karena kejenuhan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Soeharto yang bertindak otoriter dan dinilai membungkam nilai-nilai demokrasi. Pada akhirnya, momentum inilah yang membuat nama Megawati naik dan kemudian dikenal luas oleh masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan penunjukan Megawati sebagai Ketua Umum PDI tersebut, pemerintah Orde Baru kemudian menyikapi dengan memperbesar dan memfasilitasi konflik internal PDI antara Soerjadi dengan Megawati, sehingga pada saat itu PDI memiliki dualisme partai, yaitu : PDI Soerjadi dengan dukungan pemerintah Orde Baru, dan PDI Megawati hasil Kongres Luar Biasa. Dualisme partai tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan di daerah-daerah pendukung Soerjadi maupun pendukung Megawati.

Puncak dari kerusuhan tersebut dapat ditandai ketika PDI pimpinan Soerjadi menggelar kongres di Medan pada tahun 1996 yang bertujuan untuk

menjatuhkan kepemimpinan Megawati dari PDI. Di sisi lain, pendukung Megawati juga melakukan protes di daerah-daerah sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan Soerjadi. Kemudian, kubu Soerjadi secara masif merebut paksa kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 yang menyebabkan terjadinya bentrok dengan aparat keamanan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah '*Kudatuli*' atau Kerusuhan Dua Tujuh Juli.

Berbagai macam bentrok dan kerusuhan yang terjadi di daerah-daerah menyebabkan pemerintah Orde Baru akhirnya mengakui PDI pimpinan Megawati secara terbuka pada 16 Juli 1997. Setelah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Orde Baru, maka pada Oktober 1998, PDI pimpinan Megawati kemudian kembali menggelar kongres yang bertujuan untuk mengukuhkan dan memantapkan eksistensi PDI. Hasil dari kongres ini adalah menambahkan kata '*Perjuang*' sehingga nomenklatur PDI berubah menjadi PDI Perjuangan. Selain itu, Megawati juga merubah logo PDI Perjuangan dari kepala banteng dalam bingkai segi lima menjadi banteng di dalam lingkaran.

Dalam perkembangan selanjutnya, PDI Perjuangan resmi menjadi partai politik berbadan hukum pada 1 Februari 1999. Hal ini sesuai dengan hasil dari Kongres ke V, dimana arah gerak partai diperkuat melalui Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan yang baru dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kerakyatan.

Dalam keberjalanannya, PDI Perjuangan baru dapat melaksanakan Kongres pertama pada tahun 2000 di Hotel Patra Jasa Kota Semarang. Hasil dari kongres ini adalah menetapkan kepengurusan awal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dimana Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan Periode 2000 – 2005. Berikut adalah susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2000 – 2005 :

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| 1. Ketua Umum | : | Megawati Soekarnoputri |
| 2. Ketua | : | Drs. Lucas Karl Degey |
| | | Drs. Kwik Kian Gie |
| | | I Gustri Ngurah Sara |
| | | Theo Syafei |
| | | Imam Mundijat, SH |
| | | Roy BB Janis |
| | | Ir. Arifin Panigoro |
| | | Gunawan Wirosarojo |
| 3. Sekretaris Jenderal | : | Ir. Sutjipto |
| 4. Wakil Sekretaris Jenderal | : | Manggara M. Siahaan |
| | | Ir. Pramono Anung, MM |
| | | Drs. Jacobus K. Mayongpadang |
| | | Ir. Agnita Singedekane Irsal |
| 5. Bendahara | : | Dra. Noviantika Nasution |

6. Wakil Bendahara : Johanes Lukman

Dra. Sri Oetari Ratna Dewi

2.2.2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)³¹

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan partai berhaluan nasionalis yang berazaskan Pancasila 1 Juni 1945. Penyelenggaraan keorganisasian PDI Perjuangan didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan dan Piagam Perjuangan PDI Perjuangan. Hal ini selanjutnya berhubungan dengan usaha-usaha yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk mencapai cita-cita bersama yang termuat dalam visi, misi dan tujuan partai.

Gambar 2.2.

Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Sumber: PDI Perjuangan

³¹ AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Lambang PDI Perjuangan berbentuk gambar banteng hitam bermata merah serta bermoncong putih, dengan latar merah dalam lingkaran bergaris hitam putih. Lambang tersebut memiliki makna sebagai berikut:³²

1. Warna dasar merah berarti melambangkan keberanian dalam mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat;
2. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan kewaspadaan terhadap ancaman perjuangan;
3. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran; dan
4. Lingkaran bergaris hitam melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa terputus

Selain lambang partai, PDI Perjuangan mempunyai visi dan misi partai.

Visi dan misi PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:

Visi PDI Perjuangan yaitu:³³

1. sebagai alat perjuangan guna membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi (Tri Sila);

³² AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

³³ AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 6

3. sebagai alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. sebagai wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. sebagai wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Misi PDI Perjuangan yaitu:³⁴

1. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
2. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.
3. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;

³⁴ AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 7 - 8

4. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
5. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
6. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
7. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasasila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi PDI Perjuangan yaitu:³⁵

³⁵ AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 9

1. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-lembaga Politik dan Lembaga-lembaga Publik;
3. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
6. membangun komunikasi politik berlandaskan hakikat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Tugas PDI Perjuangan yaitu:³⁶

1. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa, dan bernegara;
3. menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

³⁶ AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 10

4. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
5. memperjuangkan kebijakan politik Partai sebagai kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
8. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

Berdasarkan pada hasil Kongres V tanggal 10 Agustus 2019 yang bertempat di Bali, PDI Perjuangan menetapkan kepengurusan baru DPP PDI Perjuangan Periode 2019 – 2024. Berikut adalah susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2019 – 2024 :

Tabel 2.2.
Struktur Kepengurusan DPP PDI-P 2019-2024

No	Jabatan	Nama
	(1)	(2)
1	Ketua Umum	Megawati Soekarnoputri
2	Ketua Bidang Kehormatan Partai	Komarudin Watubun
3	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Bambang Wuryanto
4	Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	Djarot S. Hidayat
5	Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	Sukur Nababan
6	Ketua Bidang Politik dan Keamanan	Puan Maharani
7	Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan	Yasonna H Laoly
8	Ketua Bidang Perekonomian	Said Abdullah
9	Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	I Made Urip
10	Ketua Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan	Rohmin Dahuri
11	Ketua Bidang Luar Negeri	Ahmad Basarah
12	Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana	Ribka Tjiptaning
13	Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial	Nusyirwan Soejono
14	Ketua Bidang Kesehatan dan Anak	Sri Rahayu
15	Ketua Bidang Kebudayaan	Tri Rismaharini
16	Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Mindo Sianipar
17	Ketua Bidang Pariwisata	Wiranti Sukamdani

	(1)	(2)
18	Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	Eriko Sotarduga
19	Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME	Hamka Haq
20	Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital	Prananda Prabowo
21	Sekretaris Jenderal (Sekjen)	Hasto Kristiyanto
22	Wakil Sekjen Bidang Internal	Utut Adianto
23	Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan	Sadarestuwati
24	Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan	Arief Wibowo
25	Bendahara Umum	Olly Dondo Kambey
26	Wakil Bendahara Umum Bidang Internal	Rudianto Tjen
27	Wakil Bendahara Umum Bidang Program	Juliari Peter Batubara

Sumber: Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan, www.pdiperjuangan.id, 2021

2.2.3. PDI Perjuangan Kabupaten Klaten

Terbentuknya PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten tidak terlepas dari proses terbentuk dan berkembangnya PDI Perjuangan di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pembentukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan pada dasarnya merupakan tuntutan mekanisme kehidupan partai yang harus berlangsung dan berjalan di tingkat daerah maupun cabang dan dengan demikian merupakan perwujudan dari tahap konsolidasi yang berhasil dicapai oleh pusat baik di tingkat daerah maupun cabang.

PDI Perjuangan Kabupaten Klaten sendiri telah terbentuk sejak masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yakni pada tanggal 10 Januari 1973. Kemudian bertepatan pada Kongres ke V pada tanggal 1 Februari tahun 1999, PDI mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, sehingga bersamaan dengan ini terbentuklah PDI Perjuangan Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Kabupaten Klaten pada Minggu, 14 Juli 2019 di Semarang, Sri Mulyani mendapatkan rekomendasi dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk memimpin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten periode 2019 – 2024. Hasil dari Konfercab tersebut memutuskan struktur kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten masa bakti 2019 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Struktur Kepengurusan DPC PDI-P Kabupaten Klaten 2019-2024

No	Jabatan	Nama
	(1)	(2)
1	Ketua	Sri Mulyani
2	Wakil Ketua Bid. Kehormatan	Aris Prabowo
3	Wakil Ketua Bid. Organisasi	Hartanto
4	Wakil Ketua Bid. Pemenangan Pemilu	Agus Wibowo
5	Wakil Ketua Bid. Komunikasi Politik	Hamenang Wajar Ismoyo
6	Wakil Ketua Bid. Hukum	Sutarna

	(1)	(2)
7	Wakil Ketua Bid. Perempuan	Hartanti
8	Wakil Ketua Bid. Kaderisasi	Suradji
9	Wakil Ketua Bid. Maritim	Heti Purwani
10	Wakil Ketua Bid. Ekonomi	Joko Siswanto
11	Wakil Ketua Bid. Kebudayaan	Sri Murni
12	Wakil Ketua Bid. Pemuda	Edi Sasongko
13	Wakil Ketua Bid. Pariwisata	Desi Purnamasari
14	Wakil Ketua Bid. Petani dan Nelayan	Aris Widhiarto
15	Sekretaris	Agus Riyanto
16	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Hendry Gunawan
17	Wakil Sekretaris Bidang Program	Arif Nugroho
18	Bendahara	Sutarjo
19	Wakil Bendahara	Mulyatminah

Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, 2021

Berhubungan dengan Pilkada Klaten 2020, PDI Perjuangan Klaten dalam rangka untuk memenangkan kontestasi Pilkada Klaten membentuk tim kemenangan wilayah PAC (kecamatan). Susunan anggota tim kemenangan disetiap wilayah PAC untuk Pilkada Klaten 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Tim Pemenangan Kampanye PAC PDI Perjuangan Klaten Pada Pilkada Klaten 2020

No	PAC	Nama / Jabatan		
		Ketua	Sekretaris	Bendahara
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prambanan	Nur Hilal Abas	Sutejo	Dewi A.
2	Gantiwarno	Sugeng Widodo	Gatot Subyakto	W. Agus Prawoto
3	Wedi	Agus Budi Mulyanto	Sunaryo	Joko Sri Mulyani
4	Bayat	Supriyadi	Y. Ari Supriyanta	Sukaca
5	Cawas	Setiyanto	Subarjo	Tugino Anom
6	Trucuk	Narwanto	Wahyono	Anik Surani
7	Kalikotes	Joni Sugiarto	Irawan Basir	Joko Purwanto
8	Kebonarum	Tribatin Samiun	Yani	Winarso
9	Jogonalan	Sutarno	Erta	Sunaryono
10	Manisrenggo	Agus Prihadi	Tri Waluyo PR	Suci Anik
11	Karangnongko	Triyono Adi	Darmini	Surowi Tenang
12	Ngawen	H. Tugirin	Tri Joko	FX. Sriyatno
13	Ceper	Supandoyo	Hartono	Gunawan Sri Widodo
14	Pedan	Djarwanto H	Suparjo	Sugiyarti
15	Karangdowo	Okta Adi Pratama	Juli Kristyanto	Pramono
16	Juwiring	Guntur B. Abdullah	Sardi	Hadi Sutanto
17	Wonosari	Ropiya	Suyadi	Suyatno

	(1)	(2)	(3)	(4)
18	Delanggu	Sri Wihantoro	Ant. Didik Partono	Heri Sarwanto
19	Polanharjo	Andi Kusuma N.	Sapto Prakoso	Agus Budi Santoso
20	Karanganom	Sri Mulyono	Danang Sindu S.	Hargiyanto
21	Tulung	Haryana	Murjaka	Sri Wahyuni
22	Jatinom	Jumiran	Febri Hastiyanto	Eko Budi Priyono
23	Kemalang	Lipur	Saryono	Amaria I.
24	Klaten Selatan	T. Sumadi	Suhari	Sri Isnaini
25	Klaten Tengah	T. Setyowati	Wawan Fugyasmu	Agus Jombor
26	Klaten Utara	Surata	Harini	Sri Legowo

Sumber : KPU Kabupaten Klaten 2020, diolah

2.3. Peta Politik Kabupaten Klaten

2.3.1. Peta Politik Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Klaten

Pada Pemilu Kabupaten Klaten 1999, PDI Perjuangan berhasil menguasai 22 kursi di DPRD. Hal ini untuk pertama kalinya PDI Perjuangan menang besar setelah jatuhnya rezim orde baru. Perspektif masyarakat telah bergeser semenjak reformasi 1998, dimana Partai Golkar tidak menjadi penguasa di pemerintahan. PDI Perjuangan berhasil mengembalikan citra sukarnois yang sudah lama dirindukan oleh masyarakat Indonesia, karena semenjak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto, demokrasi serasa mati serta melahirkan rezim otoriter Orde Baru.

Kemudian pada 2004, PDI Perjuangan hanya memperoleh 18 kursi di DPRD Klaten, hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan internal partai dimana PDI Perjuangan gagal mengontrol perilaku kadernya di DPRD sehingga mengakibatkan citra buruk PDI Perjuangan. Selanjutnya pada 2009, PDI Perjuangan mendapat 15 kursi di DPRD Klaten, tren turunnya perolehan kursi DPRD ini diakibatkan oleh adanya beberapa masalah internal PDI Perjuangan dan ditangkapnya Murdoko selaku ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah sekaligus Ketua DPRD Jawa Tengah karena tersandung kasus korupsi dana kas daerah Kabupaten Kendal untuk kepentingan pribadi³⁷ turut mempengaruhi citra nasional PDI Perjuangan sehingga berdampak pada perolehan suara pemilu legislatif secara nasional. Selanjutnya pada tahun 2014 dan 2019, tren perolehan suara PDI Perjuangan cenderung naik. Pada 2014, tren kenaikan ini salah satunya diakibatkan oleh efek kembalinya citra baik PDI Perjuangan yang menjadi oposisi pemerintah ditambah dengan ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah, dimana banyak kader Partai Demokrat tersandung kasus korupsi, seperti Anis Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Andi Mallarangeng (Mantan Menpora), M. Nazarudin (Bendahara Umum Partai Demokrat), Jero Wacik (Ketua DPP Partai Demokrat) dan Angelina Sondakh (Bekas Wakil Sekjend Partai Demokrat). Pada 2019, kecenderungan kenaikan perolehan suara PDI Perjuangan

³⁷ Terbukti Korupsi, Ketua DPRD Jateng Murdoko Divonis 2,5 Tahun Bui, <https://news.detik.com/berita/d-2086395/terbukti-korupsi-ketua-dprd-jateng-murdoko-divonis-25-tahun-bui>, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 17.40 WIB.

salah satunya diakibatkan oleh efek ekor jas yang dimiliki oleh Joko Widodo yang mencalonkan kembali pada pemilu 2019. Hal ini turut memberikan dampak kenaikan perolehan suara yang cukup signifikan secara nasional maupun secara lokal seperti di Jawa Tengah dan terkhusus di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.5.

Daftar Komposisi Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Klaten Pada Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019

No	Partai Politik	1999	2004	2009	2014	2019
1	PDIP	22	18	15	17	19
2	Partai Golkar	5	7	10	8	7
3	Partai Demokrat	-	1	6	2	3
4	PKB	3	4	1	3	4
5	Partai Gerindra	-	-	1	5	5
6	PKS	1	5	5	5	5
7	PAN	6	7	6	5	4
8	PPP	-	2	2	2	2
9	Partai NasDem	-	-	-	1	1
10	Partai Hanura	-	-	3	2	-
11	PBB	1	-	-	-	-
12	Partai Merdeka	-	1	-	-	-
13	Partai Matahari Bangsa	-	-	1	-	-

	Jumlah	40	45	50	50	50
--	--------	----	----	----	----	----

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, diolah

2.3.2. Peta Politik Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2005

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2005 ini digelar pada tanggal 26 September 2005. Terdapat 7 provinsi, 174 kabupaten dan 32 kota yang melaksanakan pagelaran Pilkada pertama dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Kabupaten Klaten adalah satu dari beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak. Pilkada Kabupaten Klaten 2005 diikuti oleh tiga pasang calon yang berkompetisi untuk memperebutkan suara masyarakat Klaten yang terdiri atas 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Berikut adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Klaten tahun 2005 :

Tabel 2.6.

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2005

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Klaten Utara	8	64	15.480	16.300	31.780
2	Klaten Tengah	9	63	14.221	15.275	29.496
3	Klaten Selatan	12	58	13.253	14.727	27.980
4	Kalikotes	7	46	11.434	12.133	23.567
5	Ngawen	13	65	15.593	16.393	31.986
6	Kebonarum	7	30	6.693	7.457	14.150
7	Wedi	19	75	17.044	18.580	35.624
8	Jogonalan	18	81	19.481	20.511	39.992
9	Gantiwarno	16	59	12.681	13.514	26.195

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Prambanan	16	66	15.416	16.527	31.943
11	Manisrenggo	16	66	13.572	14.767	28.339
12	Kemalang	13	56	12.039	12.688	24.727
13	Karangnongko	14	57	12.261	13.630	25.891
14	Jatinom	18	88	19.467	20.563	40.030
15	Karanganom	19	71	15.889	16.787	32.676
16	Tulung	18	84	17.850	19.045	36.895
17	Polanharjo	18	64	14.236	15.586	29.822
18	Delanggu	16	65	14.471	15.834	30.305
19	Ceper	18	93	22.085	23.057	45.142
20	Juwiring	19	83	19.479	21.022	40.501
21	Wonosari	18	93	21.322	22.981	44.303
22	Pedan	14	71	16.836	17.699	34.535
23	Trucuk	18	107	27.278	28.434	55.712
24	Karangdowo	19	73	16.403	17.512	33.915
25	Bayat	18	96	20.930	21.811	42.741
26	Cawas	20	88	20.722	22.316	43.038
	Jumlah	401	1.862	426.136	455.149	881.285

Sumber : KPU Kabupaten Klaten, 2005

Berdasarkan data KPU diatas, diperlihatkan bahwa jumlah total dari pemilih tetap pada Pilkada Kabupaten Klaten 2005 adalah 881.285 jiwa yang mana terdiri dari 426.136 laki-laki dan 455.149 perempuan. Data jumlah pemilih tetap diatas adalah orang-orang yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Klaten pada tahun 2005 yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan KPU. Pada Pilkada tersebut terdapat 605.859 jiwa yang menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin Kabupaten Klaten periode 2005-2010. Dari 605.859 jiwa yang menggunakan hak pilihnya, terbagi menjadi tiga pilihan yaitu:

Tabel 2.7.

Rekapitulasi Jumlah Suara Pilkada Kabupaten Klaten 2005

Nama Cabup – Cawabup Klaten 2005			Total Suara Sah
Sunarna – Samiadji	Otto Saksono – Anton Suwanto	Warsito – Wuryadi	
219.507	205.776	180.576	605.859
36.23%	33.96%	29.80%	100%

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, 2005

Dari data rekapitulasi diatas diperoleh kesimpulan bahwa ada 605.859 jiwa yang ikut menyuarakan haknya pada Pilkada Klaten tahun 2005, dan terbagi pada masing-masing calon yaitu 219.507 pada Sunarna – Samiadji , 205.776 jiwa pada Otto Saksono – Anton Suwanto, dan 180.576 jiwa pada Warsito – Wuryadi. Dengan demikian, pasangan calon Sunarna – Samiadji yang diusung oleh Partai Golkar berhasil memenangkan pagelaran Pilkada Klaten tahun 2005. Namun, sebaliknya kekalahan didapatkan oleh pasangan calon Warsito – Wuryadi yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PKB. Kekalahan ini bukan tanpa sebab, hal ini diakibatkan karena konflik internal yang dialami PDI Perjuangan.

Konflik tersebut berawal ketika Haryanto Wibowo yang merupakan Bupati periode 2000-2005 tidak mendapatkan rekomendasi untuk maju kembali dari PDI Perjuangan Klaten. Oleh karena itu, PDI Perjuangan Klaten mengambil jalan tengah yaitu dengan memasang Warsito dan Wuryadi. Setelah itu, konflik ini berlanjut pada perebutan kekuasaan Ketua DPC PDI Perjuangan oleh Haryanto

Wibowo yang pada waktu itu kursi Ketua DPC sedang dijabat oleh Harry Pramono. Konflik perpecahan ini merupakan bentuk ketidakpuasan atau malah sebagai upaya balas dendam Haryanto Wibowo alhasil polemik rekomendasi untuk mencalonkan diri kembali menjadi Bupati tidak didapati. Langkah penyelesaian telah beberapa kali dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dengan mencoba untuk mempertemukan antara kedua faksi antara faksi Harry Pramono dengan faksi Haryanto Wibowo tetapi selalu mengalami kebuntuan. Hingga akhirnya, pada Maret 2006 untuk menyelesaikan perpecahan antara kedua kubu tersebut DPP PDI Perjuangan menurunkan surat yang menyatakan untuk mengambil alih persoalan internal PDI Perjuangan Klaten.³⁸

2.3.3. Peta Politik Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2010

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Klaten 2010 ini digelar pada tanggal 20 September 2010. Pilkada Kabupaten Klaten 2010 diikuti oleh tiga pasang calon yang berkompetisi untuk memperebutkan suara masyarakat Klaten yang terdiri atas 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Berikut adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Klaten tahun 2010 :

³⁸ Wakil Sekretaris Umum Bidang Program DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, Arif Nugroho, 3 Maret 2021

Tabel 2.8.

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2010

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Klaten Utara	8	79	16.828	17.803	34.631
2	Klaten Tengah	9	76	15.905	16.943	32.848
3	Klaten Selatan	12	80	15.656	17.076	32.732
4	Kalikotes	7	72	13.933	14.537	28.470
5	Ngawen	13	87	17.353	18.370	35.723
6	Kebonarum	7	42	7.765	8.568	16.333
7	Wedi	19	114	20.996	22.395	43.391
8	Jogonalan	18	108	21.920	22.752	44.672
9	Gantiwarno	16	82	15.430	16.157	31.587
10	Prambanan	16	97	19.052	20.821	39.873
11	Manisrenggo	16	84	15.899	17.417	33.316
12	Kemalang	13	67	13.481	14.168	27.649
13	Karangnongko	14	73	14.125	15.547	29.672
14	Jatinom	18	107	22.026	23.261	45.287
15	Karanganom	19	92	18.496	19.610	38.106
16	Tulung	18	105	20.939	22.178	43.117
17	Polanharjo	18	87	16.022	17.328	33.350
18	Delanggu	16	80	16.229	17.424	33.653
19	Ceper	18	119	24.795	25.769	50.564
20	Juwiring	19	115	22.983	24.581	47.564
21	Wonosari	18	121	24.755	26.296	51.051
22	Pedan	14	92	18.322	19.080	37.402
23	Trucuk	18	154	31.436	33.110	64.546
24	Karangdowo	19	94	18.666	19.891	38.557
25	Bayat	18	122	25.266	26.124	51.390
26	Cawas	20	124	24.489	25.979	50.468
	Jumlah	401	2.473	492.767	523.185	1.015.952

Sumber : KPU Kabupaten Klaten, 2010

Berdasarkan data KPU diatas, diperlihatkan bahwa jumlah total dari pemilih tetap pada Pilkada Kabupaten Klaten 2010 adalah 1.015.952 jiwa yang

mana terdiri dari 492.767 laki-laki dan 523.185 perempuan. Data jumlah pemilih tetap diatas adalah orang-orang yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Klaten pada tahun 2010 yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan KPU. Pada Pilkada tersebut terdapat 618.245 jiwa yang menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin Kabupaten Klaten periode 2010-2015. Dari 618.245 jiwa yang menggunakan hak pilihnya, terbagi menjadi tiga pilihan yaitu:

Tabel 2.9.

Rekapitulasi Jumlah Suara Pilkada Kabupaten Klaten 2010

Nama Cabup – Cawabup Klaten 2010			Total Suara Sah
Sunarna – Sri Hartini	Agus Winarno – Sri Kertati	Sarjono – Agus Murtana	
397.106	170.264	50.875	618.245
64,23%	27,54%	8,23%	100%

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, 2010

Dari data rekapitulasi diatas diperoleh kesimpulan bahwa ada 618.245 jiwa yang ikut menyuarakan haknya pada Pilkada Klaten tahun 2010, dan terbagi pada masing-masing calon yaitu 397.106 pada Sunarna – Sri Hartini , 170.264 jiwa pada Agus Winarno – Sri Kertati, dan 50.875 jiwa pada Sarjono – Agus Murtana. Dengan demikian, pasangan calon Sunarna – Sri Hartini yang diusung oleh PDI Perjuangan berhasil memenangkan pagelaran Pilkada Klaten tahun 2010. Kemenangan PDI Perjuangan ini tidak terlepas dari figur seorang Sunarna yang

sebagai seorang *incumbent* dan juga seorang pengusaha ternak yang dekat dengan beberapa lapisan masyarakat. Keberhasilan Sunarna yang sebelumnya diusung oleh Partai Golkar dalam memenangkan pada Pilkada Klaten 2005 kemarin adalah sebuah legitimasi elektabilitas ketokohan Sunarna sendiri di beberapa lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah. Kemenangan Sunarna pada Pilkada 2005 lalu juga tidak terlepas dari faktor konflik internal PDI Perjuangan Klaten. Oleh sebab itu, Sunarna memanfaatkan kesempatan ini untuk merapat ke PDI Perjuangan pada Pilkada Klaten 2010 untuk memantapkan kemenangannya untuk melanggengkan posisi Bupati Klaten kedua kalinya dengan kemenangan telak 64,23% perolehan suara. Kemenangan mutlak ini pun tidak lepas dengan adanya koalisi antara Partai Demokrat dan PKS, dimana kedua partai tersebut mengantongi total jumlah 11 kursi DPRD, yaitu diantaranya Partai Demokrat 6 kursi sementara PKS 5 kursi.

2.3.4. Peta Politik Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 ini digelar pada tanggal 9 Desember 2015. Terdapat 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota yang melaksanakan pagelaran Pilkada Serentak. . Kabupaten Klaten adalah satu daerah yang lain yang melaksanakan Pilkada Serentak. Pilkada Kabupaten Klaten 2015 diikuti oleh tiga pasang calon yang berkompetisi untuk memperebutkan suara masyarakat Klaten yang terdiri atas 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten.

Berikut adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Klaten tahun 2015 :

Tabel 2.10.

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2015

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Klaten Utara	8	63	18.381	19.287	37.668
2	Klaten Tengah	9	58	16.139	17.321	33.460
3	Klaten Selatan	12	62	17.024	18.572	35.596
4	Kalikotes	7	51	14.849	15.579	30.428
5	Ngawen	13	65	17.493	18.067	35.560
6	Kebonarum	7	31	7.801	8.468	16.629
7	Wedi	19	79	21.466	22.744	44.210
8	Jogonalan	18	83	23.348	24.212	47.560
9	Gantiwarno	16	60	15.807	16.705	32.512
10	Prambanan	16	74	19.562	20.901	40.463
11	Manisrenggo	16	64	16.496	17.851	34.347
12	Kemalang	13	53	14.425	14.862	29.307
13	Karangnongko	14	56	14.440	15.519	29.959
14	Jatinom	18	86	23.506	24.483	47.989
15	Karanganom	19	171	18.469	19.366	37.835
16	Tulung	18	82	22.484	23.783	46.267
17	Polanharjo	18	64	15.977	16.999	32.976
18	Delanggu	16	65	17.099	18.085	35.184
19	Ceper	18	90	25.395	26.242	51.637
20	Juwiring	19	87	23.044	24.316	47.360
21	Wonosari	18	91	25.058	26.373	51.431
22	Pedan	14	71	18.865	19.395	38.260
23	Trucuk	18	115	32.062	32.943	65.005
24	Karangdowo	19	73	18.734	19.642	38.376
25	Bayat	18	96	26.216	26.821	53.037
26	Cawas	20	90	24.713	25.774	50.487
	Jumlah	401	1880	508.853	534.330	1.043.183

Sumber : KPU Kabupaten Klaten, 2015

Berdasarkan data KPU diatas, diperlihatkan bahwa jumlah total dari pemilih tetap pada Pilkada Kabupaten Klaten 2015 adalah 1.043.183 jiwa yang mana terdiri dari 508.853 laki-laki dan 534.330 perempuan. Data jumlah pemilih tetap diatas adalah orang-orang yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Klaten pada tahun 2015 yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan KPU. Pada Pilkada tersebut terdapat 657.631 jiwa yang menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin Kabupaten Klaten periode 2015-2020. Dari 657.631 jiwa yang menggunakan hak pilihnya, terbagi menjadi tiga pilihan yaitu:

Tabel 2.11.

Rekapitulasi Jumlah Suara Pilkada Kabupaten Klaten 2015

Nama Cabup – Cawabup Klaten 2015			Total Suara Sah
Mustafid Fauzan – Sri Harmanto	One Krisnata – Sunarto	Sri Hartini – Sri Mulyani	
62.849	273.189	321.593	657.631
9.56%	41.54%	48.90%	100%

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, 2015

Dari data rekapitulasi diatas diperoleh kesimpulan bahwa ada 657.631 jiwa yang ikut menyuarakan haknya pada Pilkada Klaten tahun 2015, dan terbagi pada masing-masing calon yaitu 62.849 pada Mustafid Fauzan – Sri Harmanto, 273.189 jiwa pada One Krisnata – Sunarto, dan 321.593 jiwa pada Sri Hartini – Sri Mulyani. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Klaten sendiri menyentuh

angka 63,04 % dari total jumlah pemilih tetap yang ada pada Pemilihan Bupati tahun 2015. Kemudian berdasarkan dari hasil rekapitulasi diatas didapatkanlah Sri Hartini dan Sri Mulyani sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada periode 2015 – 2020.

Kemenangan Sri Hartini – Sri Mulyani tersebut terlepas dari Sri Hartini yang merupakan seorang petahana dan juga basis massa solid PDI Perjuangan di beberapa periode Pilkada yang lalu. Hal ini juga menunjukkan bahwa *statement* seorang perempuan juga mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini pun ditambah dengan latarbelakang seorang Sri Mulyani yang merupakan istri dari mantan Bupati Klaten, Sunarna. Melalui dominasi kedua keluarga inilah yang dapat dikatakan membuat PDI Perjuangan semakin kuat menguasai kursi kekuasaan pemerintahan Klaten. Akan tetapi, keterpilihan Sri Hartini tersebut tidak berlangsung lama karena kasus korupsi yang menyangkut Sri Hartini. Pada tahun 2016 Sri Hartini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dikarenakan kasus tindak pidana korupsi berupa gratifikasi terkait pengisian jabatan tertentu dengan presentase, mutasi dan promosi, uang komitmen terkait adanya bantuan dana desa, penerimaan pegawai Bank Klaten, penerimaan pegawai RSUD Bagas Waras, penerimaan pegawai PDAM. Bentuk gratifikasi ini menggunakan istilah berupa “*Uang Syukuran*”.³⁹

³⁹ Rizqi, M.D., Nurmandi, A., & Rahmawati, D.E. (2020). The Role of Sri Hartini as The Regent of Klaten Related to Corruption of Criminal Acts in Klaten District. *Jurnal Cita Hukum*, 8(2), 279–304. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i2.14854>

Kasus tindak pidana korupsi tersebut turut menyeret PDI Perjuangan Klaten karena Sri Hartini merupakan kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilkada Klaten 2015. PDI Perjuangan Klaten pun menyatakan bahwa tindak pidana korupsi Sri Hartini tersebut murni tidak ada campur tangan partai. Kasus tindak pidana korupsi ini sudah merupakan ranah pribadi Sri Hartini, bukan ranah partai. PDI Perjuangan Klaten telah memberikan sanksi tegas melalui instruksi dari DPP PDI Perjuangan untuk memecat Sri Hartini dari keanggotaan PDI P dan untuk tidak memberikan akses kuasa hukum dari partai karena hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan PDI Perjuangan.⁴⁰ Pada akhirnya, Sri Hartini divonis 11 (sebelas) tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang, dan posisi Bupati digantikan oleh Sri Mulyani yang sebelumnya merupakan pasangan Sri Hartini pada Pilkada Klaten 2015.

2.3.5. Peta Politik Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2020

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 ini berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. Kabupaten Klaten menjadi salah satu dari sekian daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020. Tercatat terdapat 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Proses penyelenggaraan Pilkada Serentak yang semula dijadwalkan pada bulan Juli tahun 2020 lalu sempat terhambat sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-

⁴⁰ Wakil Sekretaris Umum Bidang Program DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, Arif Nugroho, 3 Maret 2021

19. Namun, pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 dengan syarat peneraparan protokol kesehatan secara ketat pada 9 Desember 2020.

KPU Kabupaten Klaten menetapkan, mengundi, dan mengumumkan sejumlah 3 (tiga) pasang calon peserta dalam Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020 pada 23-24 September 2020. Pasangan calon nomor urut 1 (satu) adalah Sri Mulyani – Yoga Hardaya, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang memperoleh 19 kursi. Hal ini dibarengi dengan dukungan koalisi dari Partai Golkar yang memperoleh 7 kursi. Sebelumnya, PDI Perjuangan Klaten mengusung Sri Mulyani dengan Aris Prabowo, kader PDI Perjuangan Klaten. Namun, dengan adanya rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, pada akhirnya Sri Mulyani dipasangkan dengan Yoga Hardaya dari Partai Golkar. Dengan kata lain, pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Golkar mengantongi sejumlah 26 kursi DPRD. Sebelum

Pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah One Krisnata – Muhammad Fajri, diusung oleh gabungan 3 (tiga) partai politik yang mengantongi sejumlah 13 kursi DPRD diantaranya; Partai Demokrat 3 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 kursi dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) 5 kursi. Kemudian, pasangan calon nomor urut 3 (tiga) adalah Arif Budiyo – Harjanta, diusung oleh gabungan 4 (empat) partai politik yang mengantongi sejumlah 11 kursi DPRD diantaranya; Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) masing-masing 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 kursi dan Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) 1 kursi.

Ketiga pasangan calon tersebut saling berkompetisi untuk memperebutkan suara (mendulang suara) masyarakat Klaten yang terdiri dari 26 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Klaten. Berikut adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020 :

Tabel 2.12.

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prambanan	16	101	18.840	19.675	38.515
2	Gantiwarno	16	81	14.635	14.938	29.573
3	Wedi	19	109	19.543	20.182	39.725
4	Bayat	18	125	23.740	23.871	47.611
5	Cawas	20	118	21.982	22.895	44.877
6	Trucuk	18	158	29.826	30.110	59.936
7	Kebonarum	7	42	7.332	7.802	15.134
8	Jogonalan	18	117	22.025	22.463	44.488
9	Manisrenggo	16	85	15.785	16.423	32.208
10	Karangnongko	14	73	13.687	14.334	28.021
11	Ceper	18	132	24.305	24.779	49.084
12	Pedan	14	92	17.379	17.759	35.138
13	Karangdowo	19	89	16.782	17.283	34.065
14	Juwiring	19	118	21.742	22.358	44.100
15	Wonosari	18	125	23.065	23.674	46.739
16	Delanggu	16	84	15.631	16.350	31.981
17	Polanharjo	18	83	15.139	15.853	30.992
18	Karanganom	19	88	16.968	17.520	34.488
19	Tulung	18	105	19.606	20.132	39.738

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Jatinom	18	119	22.120	22.441	44.561
21	Kemalang	13	76	14.423	14.648	29.071
22	Ngawen	13	89	16.917	17.181	34.098
23	Kalikotes	7	72	13.700	14.047	27.747
24	Klaten Utara	8	96	17.269	18.213	35.482
25	Klaten Tengah	9	84	15.152	16.068	31.220
26	Klaten Selatan	12	89	15.791	16.687	32.478
	Jumlah	401	2.550	473.384	487.686	961.070

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan data KPU diatas, diperlihatkan bahwa jumlah total dari pemilih tetap pada Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020 adalah 961.070 jiwa yang mana terdiri dari 473.384 laki-laki dan 487.686 perempuan. KPU Kabupaten Klaten juga mencatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Klaten 2020 didapatkan hasil sebesar 81,4% yang menggunakan hak pilihnya dari total pemilih tetap sejumlah 961.070 jiwa. Dengan kata lain, terdapat 754.078 jiwa yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Klaten 2020. Dari total 754.078 jiwa yang menggunakan hak pilihnya tersebut, terbagi menjadi tiga pilihan yaitu :

Tabel 2.13.

Rekapitulasi Jumlah Suara Pilkada Kabupaten Klaten 2020

Nama Cabup – Cawabup Klaten 2020			Total Suara Sah
Sri Mulyani – Yoga Hardaya	One Krisnata – Muhammad Fajri	Arif Budiyo – Harjanta	
378.418	246.579	129.081	754.078
50.18%	32.70%	17.12%	100%

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, 2020

Dari data rekapitulasi diatas diperoleh kesimpulan bahwa ada 754.078 jiwa yang ikut menyuarakan haknya pada Pilkada Klaten tahun 2020, dan terbagi pada masing-masing calon yaitu 378.418 jiwa pada pasangan calon Sri Mulyani – Yoga Hardaya, 246.579 jiwa pada pasangan calon One Krisnata – Muhammad Fajri dan 129.081 jiwa pada pasangan calon Arif Budiyono – Harjanta. Dari hasil tersebut, KPU Kabupaten Klaten menetapkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Sri Mulyani dan Yoga Hardaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada periode 2020 – 2025.

Kemenangan tersebut tentunya tidak melalui proses yang mudah, sebab sebelumnya Sri Mulyani tersangkut beberapa polemik. Sri Mulyani tersangkut dalam berbagai isu/perkara yang tidak menyangkut kandidat seperti isu politik kekerabatan dan juga perkara penempelan stiker sosok dirinya pada bantuan *handsanitizer* Kemensos RI. Isu-isu tersebut muncul dan lantas menjadi viral diberbagai media sosial baik Instagram, Twitter maupun Facebook selama keberjalanan Pilkada Klaten 2020. Hal ini pun dapat dikatakan bahwa elektabilitas maupun citra dari Sri Mulyani menurun seiring berjalannya waktu. Meskipun *positioning* PDI Perjuangan Klaten sendiri sangat kukuh di parlemen, partai pun harus mampu untuk *branding* atau mengemas kandidat sedemikian rupa karena hal ini berkorelasi positif dengan strategi untuk memenangkan kandidat. Oleh sebab itu, strategi kemenangan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan mempunyai peranan penting didalam memenangkan kandidat, memasarkan

kandidat, juga menggiring opini publik atau pemilih untuk mendukung kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan Klaten pada Pilkada Klaten 2020.